



**PERATURAN DESA MURNISARI
KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA
NOMOR 09 TAHUN 2020**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MURNISARI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi, misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala Desa dan/atau skala Kecamatan/Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan/atau skala Kecamatan/Kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan Desa berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Murnisari Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara

Nomor 5864)

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembar Negara Tahun 2104 Nomor 2094)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 1045)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 2037)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 4)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 53)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1037)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1038)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1009)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor

1100)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1760)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa(Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 1761)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 89)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 155)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 156)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 934)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1221)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1222)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1223)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1444)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1955)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

31. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Beskala Desa (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 158)
32. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 159)
33. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 160)
34. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 161)
35. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat(Lembar Negara Tahun 2015 Nomor)
36. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 53)
37. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 300)
38. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 359)
39. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 787)
40. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa(Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1810)
41. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
42. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
43. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
44. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2020;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

45. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor)
46. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
47. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 dan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Desa Lawan Covid 19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
48. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan
49. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT nomor 9/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Tranfer Ke daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384)
52. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 1506)
53. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 83)
54. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Dan Tunjangan Penghasilan

Aparatur Pemerintah Desa (Lembar Daerah Tahun 2015 Nomor 45)

55. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembar Daerah Tahun 2019 Nomor 8)
56. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monito Ring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
57. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembar Daerah Tahun 2015 Nomor 4)
59. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah Tahun 2015 Nomor 5)
60. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 40)
61. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Lembar Daerah Tahun 2015 Nomor)
62. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 39);
63. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Keuangan Desa Di Kabupaten Cianjur (Lembar Daerah Tahun 2015 Nomor)
64. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor)
65. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
66. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
67. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun

- 2018 Nomor 79);
68. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 69. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
 70. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 71. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 72. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
 73. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
 74. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86)
 75. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
 76. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
 77. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
 78. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
 79. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
 80. Peraturan Desa Murnisari Nomor Tahun Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 81. Peraturan Desa Murnisari Nomor Tahun Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Murnisari

82. Peraturan Desa Murnisari Nomor Tahun Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul berskala Desa
83. Peraturan Desa Murnisari Nomor Tahun Tentang Aset Desa
84. Peraturan Desa Murnisari Nomor Tahun Tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Murnisari Tahun
85. Peraturan Desa Murnisari Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2026

MEMUTUSKAN:

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURNISARI

DANKEPALA DESA MURNISARI

Menetapkan : **PERATURAN DESA MURNISARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesaadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDesa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Murnisari Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Visi dan Misi
 - 1.4. Maksud dan Tujuan
 - 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa
- b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**
 - 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.1.1. Legenda Desa (*Sasakala*)
 - 2.1.1.2. Terbentuknya Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu strategis

- c. **BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
 - 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Pagu Indikatif Desa
 - 3.3. Pendapatan Asli Desa
 - 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
 - 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga
- d. **BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA**
 - 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
 - 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 - 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- e. **BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
- f. **BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA**
- g. **BAB VII : PENUTUP**
- LAMPIRAN :**
 - 1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa.
 - 2. Pagu Indikatif Desa.
 - 3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
 - 4. Rancangan RKP Desa.
 - 5. Gambar Rencana Prasarana.
 - 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.
 - 8. Daftar usulan RKP Desa.
 - 9. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - 10. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan PTPKD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh PTPKD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dan amelalui penyusunan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Murnisari

Ditetapkan di Desa Murnisari
pada tanggal 22 Oktober 2020

KEPADA DESA Murnisari



MAMAN

Diundangkan di Desa Murnisari
pada Tanggal 22 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA MURNISARI



ANDRI SOLEHUDIN

LEMBARAN DESA MURNISARI TAHUN 2020 NOMOR 10